

RANCANGAN

RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI III DPR RI DENGAN ASRENA POLRI DAN KPK RI

(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang : 2017-2018
Masa Persidangan : V
Rapat ke :
Sifat : Terbuka
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Hari/tanggal : Kamis, 5 Juli 2018.
Waktu : Pukul 14.35 – 15.45 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI.
Ketua Rapat : Erma Suryani Ranik, SH / Wakil Ketua Komisi III DPR RI.
Sekretaris : Dra.Tri Budi Utami, SH, M.Si / Kepala Bagian Sekretariat
Komisi III DPR RI.

KETUA RAPAT (ERMA SURYANI RANIK, S.H.):

Kita bisa mulai, Pak Azis? Dengan izin Ketua Banggar dulu ini.

***Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua.***

Yang saya hormati Bapak/Ibu Anggota Komisi III beserta Pimpinan KPK dan Jajarannya, Bapak Asrena Polri beserta Jajarannya,

Ini Pak Asrena penugasan baru ya, Pak. Selamat datang, Pak.

Hadirin yang kami muliakan,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan-Nya pada hari ini kita boleh mengadakan rapat dalam keadaan sehat wal'afiat.

Sesuai dengan laporan Sekretariat, rapat ini sudah ditandatangani dari 8 (delapan) fraksi yang hadir dari tadi pagi, karena itu sudah memenuhi ketentuan Pasal 251 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tatib, dengan ini perkenankanlah kami membuka rapat ini dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 14.00 WIB)

Selanjutnya kami berterima kasih untuk dua mitra yang menjadi sesi penutup dari rangkaian rapat jadwal pembahasan anggaran Komisi III bersama dengan mitranya. Tadi pagi kami dengan Sekretaris Mahkamah Agung, kemudian Sekjen Kementerian Hukum dan HAM serta Jambin Kejaksaan Agung. Mudah-mudahan setelah dengan Pak Asrena dan juga Pimpinan KPK, Pleno Komisi III bisa segera diputuskan untuk kemudian kita kirim ke Pimpinan Banggar, kebetulan Ketua Banggarnya ada di tempat dan juga Anggota Komisi III.

Bapak/Ibu yang saya hormati,

Jam saat ini Pukul 14.35. Saya menawarkan, kalau kita bisa maksimal selesai Pukul 14.00 kira-kira disepakati? *Sorry*, Pukul 16.00. Bisa disepakati? Itu maksimal, Pak. Jadi kalau bisa lebih cepat lebih baik ya. Kita sepekat selesai Pukul 16.00 ya?

(RAPAT: SETUJU)

Bapak/Ibu sekalian,

Untuk mempersingkat waktu kami persilakan paparan dari dua mitra kerja kita. Pertama-tama kita beri kesempatan kepada KPK terlebih dahulu. Silakan, 15 menit ya. Siapa yang memaparkan, Ibu atau Bapak? 15 menit ya, Ibu.

WAKIL KETUA KPK (ALEXANDER MARWATA):

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,

Salam sejahtera untuk kita semuanya.

Kepada yang terhormat Ketua Komisi III serta Bapak/Ibu Anggota Komisi III yang saya hormati,

Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan.

Kami dari KPK akan memaparkan terkait dengan penganggaran sebagaimana yang diminta oleh Komisi III terkait dengan realisasi anggaran tahun 2017, kemudian tahun 2018 dan rencana anggaran KPK untuk tahun 2019.

Baik, *slide* pertama pagu dan realisasi anggaran KPK untuk tahun 2017 ini pagunya 849 miliar. Adapun realisasinya adalah Rp780.200.000.000,- atau sekitar 92,67% dari anggaran sebagaimana terlihat dalam grafik perkembangannya dari tahun 2013 sampai dengan 2018. Kemudian anggaran realisasi tahun 2017 berdasarkan program bisa kita lihat bahwa di KPK ada dua program yaitu program dukungan manajemen dan teknis lainnya serta program pemberantasan tindak pidana korupsi. Pagu anggaran program dukungan manajemen sebesar 620 miliar. Adapun realisasinya adalah 584,6 miliar atau 94%, sedangkan untuk program pemberantasan tindak pidana korupsi dari anggaran 229,4 miliar realisasinya 88,34% atau 202,7 miliar. Sedangkan kalau dilihat dari jenis belanja dapat kita lihat dari anggaran belanja pegawai 478,5 miliar realisasinya 471 miliar atau 98,60%, sedangkan belanja barang dari anggaran 274,5 miliar realisasinya 228,2 miliar atau 83,14% dan belanja modal dari anggaran 96,5 miliar realisasinya adalah 87,3 miliar atau 90,41%. Sedangkan kalau dilihat dari belanja per unit kerja di KPK, di KPK ada 5 (lima) unit kerja yaitu Sekretariat Jenderal, Deputi Penindakan, Deputi Pencegahan, Deputi Ina (Informasi dan Data) dan Deputi PIPM (Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat). Di Sekretariat Jenderal dari anggaran 141,61

miliar realisasinya 80% atau 112,81 miliar, di Kedeputusan Penindakan dari anggaran 59,37 miliar realisasinya 51,83 miliar atau 87%, sedangkan Deputi Pencegahan dari anggaran 67,07 miliar realisasinya 78% atau 52,38 miliar, Deputi Inda dari anggaran 98,18 miliar realisasinya 94,47 miliar, sedangkan paling kecil adalah di Kedeputusan PIPM dari anggaran 4,80 miliar realisasinya adalah 4,02 miliar atau 83%. Sebagian besar anggaran di KPK sebetulnya diperuntukkan untuk belanja pegawai yaitu dari anggaran 478,5 miliar terdapat realisasinya sebesar 471,8 miliar atau 97%.

Bapak/Ibu sekalian,

Dari anggaran yang disediakan untuk tahun 2017 kinerja penindakan di KPK dapat kita lihat menyangkut kinerja penindakan pada tahun 2017, KPK melakukan 123 tindakan penyelidikan, kemudian dilanjutkan dengan 121 penyidikan, ada 103 kegiatan penuntutan dan kegiatan eksekusi untuk pelaksanaan putusan pengadilan ada 83 kegiatan. Dari kegiatan penanganan perkara dan pelaporan gratifikasi KPK memperoleh penerimaan negara bukan pajak yang jumlahnya secara keseluruhan sebesar 193 miliar. Barang rampasan yang diputuskan oleh pengadilan ada yang kita hibahkan, dihibahkan oleh Kementerian Keuangan melalui KPK sejumlah 88,6 miliar. Jadi dari putusan pengadilan itu tidak semuanya kita lelang, tetapi berdasarkan permintaan dari berbagai instansi itu ada sejumlah barang hasil rampasan yang kita hibahkan.

Kemudian untuk kinerja di Kedeputusan Pencegahan ini dapat kita lihat ada pelatihan teknis audit investigasi pengadaan, kita bekerja sama dengan BPKP untuk melatih aparat pengawasan internal pemerintah di daerah-daerah sejumlah 1.200 auditor. Dapat Bapak/Ibu pahami bahwa korupsi yang terjadi di daerah-daerah itu sebagian besar menyangkut masalah pengadaan barang dan jasa, juga termasuk ketika kita melakukan OTT (Operasi Tangkap Tangan). Umumnya permintaan suap atau pemberian suap itu menyangkut pengadaan barang dan jasa selain masalah perizinan.

Selanjutnya untuk kegiatan pendampingan ke Pemda pada tahun 2017 kita sudah melakukan pendampingan terhadap 23 provinsi dan 380 kabupaten maupun kota. Adapun program pendampingan yang dilakukan oleh KPK itu menyangkut masalah perizinan satu pintu. Kita mendorong agar pemerintah-pemerintah di provinsi maupun di kabupaten atau kota itu membangun PTSP yang berbasis elektronik. Demikian juga terkait dengan masalah perencanaan dan penganggaran, KPK juga mendorong agar diterapkan *e-planning* dan *e-budgeting* dan juga untuk pengadaan barang dan jasa kita mendorong diterapkannya *e-procurement* maupun *e-catalog*. Kemudian dari kegiatan kajian yang dilakukan oleh Direktorat Litbang itu pada tahun 2017 kita melakukan 21 kajian, terutama yang di sektor sumber daya alam, Migas, pangan, kesehatan, infrastruktur, pendidikan, reformasi birokrasi dan penegakan hukum. Kemudian terhadap ketaatan terhadap pelaporan LHKPN pada tahun 2017, KPK menerima 246.137 LHKPN yang kami terima atau secara nasional kepatuhan penyampaian LHKPN itu sebesar 78%. Dari jumlah LHKPN yang diterima oleh KPK, KPK melakukan verifikasi atau pemeriksaan sebanyak 418 laporan.

Selanjutnya untuk kegiatan pelaporan gratifikasi pada tahun 2017 itu ada 1.685 laporan gratifikasi yang disampaikan ke KPK.

Bapak/Ibu sekalian,

Demikian tadi terkait dengan anggaran maupun realisasi anggaran tahun 2017 berikut pencapaian kinerja KPK pada tahun 2017.

Selanjutnya kami akan menguraikan realisasi anggaran pada tahun 2018. Pada tahun 2018 KPK mendapatkan alokasi anggaran sejumlah 790,2 miliar. Sampai dengan 30 Juni 2018 realisasi anggaran atau penyerapan anggaran oleh KPK sebesar 355,8 miliar atau 45%. Dari anggaran yang diterima KPK sama seperti tahun 2017 itu terdiri dari dua program yaitu program dukungan dan program pemberantasan tindak pidana korupsi. Program dukungan manajemen dan teknis lainnya itu besarnya 539,9 miliar, adapun realisasinya sampai 30 Juni sebesar 303,2 miliar. Kemudian program pemberantasan tindak pidana korupsi itu jumlahnya 250,2 miliar, serapan anggarannya baru sebesar 52,6 miliar atau 21%. Dilihat dari jenis belanja paling besar adalah belanja pegawai yang jumlahnya 406,3 miliar, kemudian serapannya 269,4 miliar atau 66,3 miliar, sedangkan belanja barang 302,9 miliar, serapannya baru 26,8% atau sejumlah 81,2 miliar. Kemudian belanja modal dari anggaran 81 miliar baru terserap 5,1 miliar atau 6,3%. Ini serapan anggaran untuk belanja barang ataupun belanja modal masih rendah itu sebetulnya, masih dalam proses kontrak, sedang berjalan dan kemungkinan nanti bulan-bulan ke depan itu baru akan kita realisasikan untuk belanja barang maupun belanja modal. Untuk belanja pegawai dibagi perkedeputian. Untuk Sekretariat Jenderal dari anggaran 133,62 miliar realisasinya 33,77 miliar atau 56%, kemudian Deputi Penindakan dari anggaran 62,54 miliar realisasinya atau serapannya 26,75 miliar, kemudian Deputi Pencegahan dari anggaran 77,33 miliar terserap 10,31 miliar atau 13%, kemudian Deputi Inda dari anggaran 105,17 miliar terserap 13,96 miliar dan Deputi PIPM dari anggaran 5,18 miliar terserap 1,56 miliar. Itu realisasi anggaran maupun realisasi anggaran pada tahun 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018 yang masih berjalan sampai dengan saat ini.

Baik, saya lanjutkan untuk usulan anggaran pada tahun 2019. Dari pagu indikatif tahun 2019 sebesar 813,45 miliar, KPK mengusulkan tambahan anggaran sebesar 171,85 miliar atau secara keseluruhan untuk tahun anggaran 2019 KPK mengusulkan alokasi anggaran sebesar 985,30 miliar. Masih di bawah 1 triliun, Bapak/Ibu. Tambahan anggaran sebesar 171,85 miliar itu kami peruntukkan untuk belanja operasional yaitu belanja pegawai sebesar 72,74 miliar. Ini diperuntukkan untuk alokasi kekurangan belanja pegawai. Seperti Bapak/Ibu ketahui pada tahun 2017 KPK itu melakukan rekrutmen pegawai yang secara keseluruhan jumlahnya sekitar 450 kalau tidak salah. 480 orang. Ini pada tahun 2017 itu belum sepenuhnya kita anggarkan, kemudian baru kita anggarkan tahun 2018, kemudian tahun 2019 itu karena ada penyesuaian terhadap tingkat kompetensi atau *grading*, sehingga memerlukan tambahan anggaran.

Selanjutnya untuk belanja operasional non pegawai layanan perkantoran, ini kita minta ada tambahan sebesar 20,43 miliar. Adapun anggaran yang diusulkan dalam pagu indikatif tahun 2019 ini kalau kita hitung baru atau hanya cukup untuk memenuhi biaya selama 8 bulan. Artinya masih kurang 4 bulan untuk belanja operasional misalnya untuk biaya pemeliharaan, langganan daya listrik, pemeliharaan gedung, operasional kendaraan, pemeliharaan *hardware/software* dan perpanjangan lisensi IT. Jadi ada beberapa peralatan yang kita beli pada tahun 2017 atau 2018 itu perlu kita pelihara dan itu dalam pagu indikatif itu belum dialokasikan. Jadi ada tambahan alokasi untuk kekurangan belanja pelayanan perkantoran sebesar 20,43 miliar. Kemudian untuk kekurangan belanja non operasional program

pemberantasan TPK kami meminta adanya tambahan sebesar 78,60 miliar. Belanja ini dialokasikan untuk memenuhi kekurangan anggaran pada program pemberantasan Tipikor, termasuk peningkatan target penyelidikan, penyidikan dan penuntutan TPK menjadi masing-masing 200 perkara. Kalau sampai saat ini KPK tahun 2017 maupun 2018 ini target dari kegiatan penindakan itu 100 perkara. Kita ingin melipatgandakan kegiatan penindakan itu menjadi 200 perkara, sehingga kita memerlukan tambahan biaya untuk kegiatan penindakan. Ini juga banyak yang protes masyarakat-masyarakat, terutama dari daerah itu, banyak laporan yang kami terima tetapi tindak lanjutnya itu yang sampai sekarang belum bisa kita lakukan karena adanya keterbatasan anggaran. Selain itu juga untuk menunjang koordinasi dan seprofesi dengan aparat penegak hukum yang lain. Ada harapan dari kami perkara-perkara dari daerah-daerah itu mungkin bisa kami limpahkan, kami koordinasikan dengan aparat penegak hukum, baik dari Kepolisian maupun Kejaksaan. Tetapi selama ini belum bisa kami lakukan. Karena apa? Dari pihak Kejaksaan maupun Kepolisian juga ada keterbatasan anggaran, Pak. Jadi kalau ingin kita limpahkan, ini mereka keberatan karena tidak tersedia anggaran. Dengan adanya tambahan anggaran ini kami berharap bahwa perkara-perkara yang ditangani oleh KPK ketika kami limpahkan ke aparat penegak hukum yang lain itu dapat kami biayai.

Mungkin itu usulan penambahan anggaran KPK tahun 2019 maupun realisasi anggaran tahun 2018. Untuk jelasnya mungkin nanti bisa Bapak/Ibu tanyakan dan selanjutnya kami kembalikan kepada Ketua Komisi III.

Terima kasih.

**Selamat sore,
*Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.***

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Terima kasih, Pak.

Komisi III menyampaikan apresiasi, karena teman-teman KPK sudah mengirimkan kepada kita satuan tiga dari tahun anggaran 2017. Sudah lengkap di sini, terima kasih banyak. Jadi ini akan menjadi bagian dari bahan pengawasan kami terkait pembahasan untuk tahun 2019. Tadi kan diusulkan dari pagu indikatif 813,4 miliar, minta tambahan ada 171 ya, kemudian ada pegawai baru, kalau saya tidak salah catat tadi ada 484 ya, Pak.

Bapak/Ibu,

Nanti kita dalam setelah teman-teman dari Polri.

Silakan, Pak Asrena. Perkenalkan diri dulu, Pak. Karena kita ini rapat pertama ini, Pak. Silakan. 15 menit juga ya, Pak.

ASRENA POLRI (IRJEN POL.GATOT EDI PRAMONO):

***Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,
Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian.***

**Yang saya hormati Ketua Komisi III, Pimpinan Komisi III, Anggota Komisi III,
Para Hadirin sekalian yang berbahagia,**

Pertama sekali sebelum saya menyampaikan paparan terkait dengan realisasi anggaran tahun 2017, 2018 dan anggaran 2019, sesuai dengan arahan dari Pimpinan Komisi III, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Gatot Edi Pramono, lahir di Solok, Sumatera Barat tanggal 28 Juni 1965. Saya Akpol angkatan 88. Penugasan saya sebelum menjadi Asrena 3 (tiga) penugasan ke belakang saja yaitu Karolemtala Srena Polri, kemudian Wakapolda Sulawesi Selatan, Staf Ahli Sosial Ekonomi dan yang terakhir seminggu yang lalu saya sudah serah terima menjadi Asrena Kapolri. Ini perkenalan awal. Mudah-mudahan dengan perkenalan ini akan semakin mendekatkan diri dengan Komisi III khususnya terkait dengan anggaran-anggaran di Polri dan mendapat dukungan penuh dalam anggaran Polri ini khususnya.

Baik, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan yang pertama tentu terkait dengan realisasi anggaran Polri pada tahun 2017. Pada tahun 2017 Polri menerima anggaran sebanyak 99,4 triliun yang dapat direalisasikan sebesar 93,9 triliun atau 94,5%, itu yang bisa kita realisasikan. Kalau kita lihat dari per belanja, belanja pegawai kita bisa realisasikan yaitu sebanyak 94,6%, kemudian belanja barang sebanyak 94,7%, belanja modal sebanyak 94,2%. Kemudian kalau dielaborasi kepada program sebanyak 13 program yang dilaksanakan pada tahun 2017:

- Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis, ini sebanyak 93,7% bisa kita realisasikan
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Polri, ini sebanyak 94,6%
- Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Polri sebanyak 98,4%
- Program penelitian dan pengembangan Polri sebanyak 99,8%
- Program pendidikan dan latihan aparatur Polri sebanyak 96,2%
- Program pemberdayaan sumber daya manusia Polri sebanyak 96,2%
- Program pengembangan strategi keamanan dan ketertiban sebanyak 98%
- Program kerja sama keamanan dan ketertiban sebanyak 99% realisasinya
- Program pemberdayaan potensi keamanan sebanyak 97,7%
- Program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat sebanyak 93,3%
- Program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sebanyak 97,8%
- Program penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri sebanyak 2,7%, dan
- Program pengembangan hukum kepolisian sebesar atau sebanyak 99,2%.

Selanjutnya saya akan menjelaskan realisasi anggaran tahun 2018. Semester I yaitu sampai dengan tanggal 3 Juli 2018, dimana dalam hal ini anggaran Polri sebesar 96,5 triliun. Realisasi anggaran yaitu sebanyak 38,5 triliun, atau 39,9%. Jadi sampai dengan tanggal 3 Juli ini kita sudah bisa menyerap sebanyak 39,9%. Dengan rinciannya, yaitu:

- Belanja pegawai sebanyak 44,2, itu bisa kita serap sebanyak 24,7 triliun, atau sebanyak 56%;
- Belanja barang itu sebesar 23,1 triliun, ini bisa kita serap sebanyak 8,2 triliun atau 35,5%;

- Belanja modal itu sebanyak 29,1 triliun, kemudian bisa di serap atau di realisasikan sebesar 5,4 triliun atau 18,8%.

Kalau kita lihat daripada rencana penarikan anggaran, yaitu pada bulan Juni, yaitu sebanyak 39,9%, itu meningkat. Target kita 35,64% kita bisa menyerap anggaran pada bulan Juni ini. Tetapi sampai dengan tanggal 3 Juli itu sudah 39,90%, berarti bisa melebihi lebih kurang 3% dari target yang sudah kita rencanakan, karena setiap bulannya kita membuat rencana penarikan anggaran atau penarikan dana.

Dari 13 program yang ada, saya ingin menjelaskan berapa persen diserap oleh masing-masing program ini. Program yang pertama yaitu:

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas ini sebanyak 53,6%;
2. Program peningkatan sarana/prasarana itu sebanyak 21,1%;
3. Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas sebanyak 57,6%;
4. Program penelitian dan pengembangan Polri itu sebanyak 43,9%;
5. Kemudian program pendidikan dan latihan aparatur Polri ini sebanyak 45,1%;
6. Program pemberdayaan sumber daya manusia sebanyak 66%;
7. Program pengembangan strategi keamanan sebanyak 45,8%;
8. Program kerjasama keamanan dan ketertiban sebanyak 47,5%;
9. Program pemberdayaan potensi keamanan 46,1%;
10. Program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat sebanyak 39%;
11. Program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana itu sebanyak 49,6% realisasinya;
12. Program penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri sebanyak 56,9%;
13. Dan terakhir, program pengembangan hukum kepolisian itu sebanyak 52,1%.

Bapak Pimpinan serta Anggota Dewan yang saya hormati,

Polri sudah menerima pagu indikatif dari Kementerian Keuangan yaitu sebanyak 76 triliun 902,92 miliar. Kami ingin menjelaskan kepada Bapak dan Ibu sekalian, bahwa pada tanggal 14 Maret 2018 sebenarnya Polri sudah mengirimkan satu ajuan sebanyak 126,8 triliun dengan rincian yaitu:

- 49,9 triliun untuk belanja pegawai;
- Belanja barang sebanyak 36,5 triliun;

Ini termasuk di situ adalah kebutuhan kita untuk pengamanan pemilu sebesar 5 triliun. Kemudian belanja modalnya sebanyak 40,3 triliun. Tetapi ketika pagu indikatif itu turun kepada Polri, yaitu sebanyak 76,9 triliun. Dimana juga anggaran untuk pengamanan pemilu yang kita rencanakan sebanyak 5 triliun itu dimasukkan sebanyak 2,3 triliun. Kalau kita lihat dari ajuan kita dengan pagu indikatif yang turun, itu terpenuhi sebanyak 60,62% dari pengajuan yang diajukan oleh Polri. Dan kemudian kalau kita membandingkan dengan tahun anggaran 2018, yaitu sebesar 9...triliun, itu berkurang juga 18,1 triliun, atau minus 19,8%. Oleh karena itulah pada kesempatan ini kita mencoba meneliti, setelah pagu indikatif itu turun ada kekurangan-kekurangan, baik itu pada belanja barang, belanja pegawai, maupun belanja modal. Jumlah kekurangan tersebut itu sudah kita ajukan kepada Kementerian Keuangan sebanyak 44,4 triliun.

Kami ingin menjelaskan atau kami rincikan sebagai berikut:

Kenapa kami ingin menambah sebanyak 44,4 triliun? Dari belanja pegawai yaitu untuk memenuhi perkiraan kebutuhan antara lain:

Yang pertama, penyesuaian tunjangan kinerja yang naik 20%. Dari hitungan yang kami lakukan itu apabila tunjangan kinerja naik, yang kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Presiden, bahkan sekarang suratnya sedang ada di Kementerian PAN, nanti kalau Perpres turun mulai bulan Juli itu anggota Polri sudah menerima 70%. Untuk tahun 2019 itu lebih kurang anggaran yang dibutuhkan untuk tunjangan saja 4,4 triliun, itu lebih kurang. Kemudian untuk pemenuhan kebutuhan peningkatan tipe satker. Ini juga hitungannya sudah kita hitung. Peningkatan status satker. Kemudian intek personal yang ada untuk membayar gaji yang baru masuk. Itu kita sudah hitung sebanyak 6,7 triliun. Kemudian belanja barang kami tetap menginginkan sesuai dengan usulan, yaitu 5 triliun. Sehingga kita menambahkannya sebanyak lebih kurang 2,7 triliun. Kalau dalam pagu indikatif itu 2,3, kami ingin menambahkan 2,7. Kenapa? Kalau itu kita menggunakan pagu indikatif sebanyak 2,3, itu pengamanan yang kita lakukan sangat minimal sekali. Saya mengambil salah satu contoh tahapan. Dalam tahapan pemilukada saja itu pada saat pencoblosan itu 2/3 kekuatan. Sedangkan pada saat pemilu nanti kalau kita menggunakan pagu indikatif yang 2,3 triliun itu hanya setengah daripada kekuatan kita. Berarti kita mengurangi kekuatan-kekuatan minimal yang akan kita gunakan. Sementara ancaman yang kita hadapi itu ke depan semakin besar. Seperti terorisme dan lain sebagainya, dimana perlu penguatan-penguatan personal, baik itu pada TPS maupun tempat-tempat penghitungan suara, sehingga kita memerlukan penambahan-penambahan anggaran, sehingga pada tahapan-tahapan pemilu itu kita menyiapkan pasukan yang betul-betul maksimal. Tidak setengah 1/6, tapi pada puncaknya itu 2/3. Bahkan kita juga perlu menyiapkan yang namanya 'Operasi Cipta Kondisi', ini kita masukkan di dalam kegiatan ini untuk pemilu, sehingga kita menambahkan lebih kurang 2,780 triliun.

Kemudian juga 'harwat', kendaraan 735 miliar. Memang kita sudah mendapatkan harwat di pagu indikatif, tetapi itu masih kurang. Kenapa masih kurang? Pengadaan-pengadaan yang ada pada tahun 2017 itu ada pada tahun 2018, itu belum ada biaya harwatnya, sehingga kita masukkan. Kalau kita menggunakan dana harwat yang kalau di lihat dari pagu indikatif itu juga dananya turun dibandingkan dengan harwat tahun 2017. Sehingga setelah di hitung keluar angkanya sebanyak 735 miliar.

Demikian juga dengan BMP, kenapa kita menambahkan 1,15 triliun. Demikian juga karena ada tambahan-tambahan baru, baik itu kendaraan baru, kapal-kapal baru yang sudah ada pengadaannya. Lalu berapa jumlah BMP yang diberikan. Memang kita diberikan BMP hampir sama, 1 triliun lebih untuk tahun 2018 dalam pagu indikatif. Kalau kita menggunakan ini berarti kita akan mengurangi indeks kepada anggota. Anggota yang dulu umpamanya dapat itu 8 liter, nanti akan berkurang.

Oleh karena itu kita menghitung. Dengan tambahan kendaraan yang ada, kemudian kapal-kapal yang ada, pesawat yang baru, kita menghitung tambahannya sebanyak 1,15 triliun. Kemudian juga kita untuk meningkatkan kinerja fungsi lidik/sidik dan juga penguatan Densus 88.

KETUA RAPAT:

Pak Asrena, 5 menit lagi saya kasih tambahan.

ASRENA POLRI (IRJEN POL.GATOT EDI PRAMONO):

Baik, Ibu. Terima kasih.

Terkait dengan fungsi lidik/sidik kenapa kita ingin menambahkan? Kalau kita mencoba menghitung daripada *crime clearance* yang ada itu sangat kurang sekali, makanya kita menambahkan.

Kemudian kenapa Densus perlu penguatan? Kita ada 16 satgaswil, sementara kita ada 34 polda. Untuk mengantisipasi terorisme, sementara Bapak Kapolri membuat satgas-satgas di polda yang tidak ada satgaswil, ini perlu anggaran. Kita hitung untuk penguatan itu.

Yang terakhir adalah terkait dengan belanja amodal sebanyak 32,6 triliun. Disini juga kita ingin menambah pembangunan-pembangunan terhadap mako-mako Polri, kemudian juga pembangunan rumah dinas, fasilitas pendukung, kemudian juga almatsus. Ini yang kita lakukan. Sehingga setelah kita hitung, kita membutuhkan sebanyak lebih kurang 32,6 triliun.

Ini yang kita ajukan kepada Pimpinan Komisi III, dengan harapan tentunya ajuan anggaran tambahan sebanyak 44,4 triliun itu dapat dipenuhi, sehingga operasional kegiatan kepolisian dapat maksimal dalam mewujudkan keamanan dalam negeri yang aman, damai, sejuk dan kondusif.

Sekian paparan dari kami. Selanjutnya kami mohon arahan dari Pimpinan Komisi III untuk tindak lanjut daripada anggaran yang sudah kami susun.

Terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Terima kasih Pak Asrena atas paparannya.

Kita akan langsung pendalaman oleh Anggota. Pak Ketua mau duluan atau setelah anggota, Pak Ketua? Duluan? Ada beberapa hal dari Pak Ketua dulu, silakan Pak Ketua.

F-PG (Drs. H. KAHAR MUZAKIR):

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

**Bapak Komisioner KPK, Pimpinan KPK, beserta seluruh jajarannya yang terhormat,
Bapak-bapak dari Polri, Pak Asrena beserta seluruh jajarannya yang kami hormati,**

Topik pembicaraan kita adalah masalah tambahan anggaran, topik utamanya itu. Kalau yang sudah jadi pagu tidak mungkin kita bahas lagi, walaupun pagu indikatif. Coba kita turunkan itu, tidak mungkin kan. Jadi supaya kita efektif, saya bersaran, kata orang Malaysia itu, kita yang nambah itu saja. Mengingat di depan kita ini adalah dua penegak hukum sebetulnya yang biasanya ikut mengawasi untuk penggunaan-penggunaan anggaran ini, kalau saya itu untuk Bapak/Ibu yang di depan kita ini, itu setuju saja di tambah. Kan tadi alasannya sudah jelas itu. Tidak

mungkin jadi ke kiri dan ke kanan itu. Masalah kemudian bisa terpenuhi atau tidak tergantung kemampuan negara. Jadi saya bersaran seperti itu. Ini kan masih perjalanan panjang, dari pagu indikatif jadi pagu sementara. Pagu sementara itu setelah nota keuangan presiden. Dari pagu sementara, baru pagu tetap. Kita besok berputar-putar kayak begitu. Setelah ini masuk, turun nota keuangan yang disampaikan Presiden tanggal 16 Agustus, kita bahas lagi itu. Kalau belum terpenuhi ya kita minta supaya terpenuhi. Tergantung apakah program Bapak/Ibu menurut kacamata Pemerintah sebetulnya termasuk program prioritas atau tidak. Dan itu akan dibicarakan di Badan Anggaran di Panja Belanja Pusat. Kita di sini cuma membuat keputusan yang berdasarkan keyakinan kita. Dasarnya itu adalah Undang-Undang MD3 Pasal 98 ayat (2) a, b, dan c itu. Bunyinya yaitu kita menerima usul, kita bicarakan bersama, dan kemudian kita putuskan. Jadi tugas komisi itu menetapkan anggaran kementerian dan lembaga yang menjadi mitra kerjanya. Bukan disana sebetulnya ditetapkan. Yang sana itu mensinkronkan saja sesuai dengan jumlah keuangan negara yang tersedia. Jadi seperti itu. Dan ini kita biasanya tidak ada yang ditutupi, terbuka saja. Karena kami juga tidak tahu apa yang akan dibelanjakan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Karena sudah kita tidak bicara tentang satuan tiga, tidak bicara tentang gelondongan. Makanya kita ingin penjelasan-penjelasan seperti tadi yang disampaikan itu, dari situlah kita tahu itu uangnya untuk digunakan kesitu. Jadi saran saya, Ibu, biar efektif, supaya hari ini. Kita kan sudah ini mau lagi memutuskan yang akan kita rekomendasikan yang akan menjadi putusan ke Badan Anggaran yang akan kita bicarakan dengan kapoksi-kapoksi disini untuk disepakati dan disampaikan ke Badan Anggaran. Badan Anggaran itu tidak memutuskan. Badan Anggaran itu membagi jumlah yang bisa sesuai dengan skala prioritas. Umpamanya uang cuma tersedia 2.500 triliun, padahal kita minta ini setelah dikumpulkan ada 3.000 triliun. Pada siapa yang tidak bisa dan siapa yang bisa itu juga tergantung dari pembicaraan terhadap Pemerintah dengan Badan Anggaran sana, dan Pemerintah akan membuat skala prioritas.

Jadi saya ingin menyampaikan itu, karena dulu saya juga mantan Ketua Badan Anggaran.

Terima kasih, Ibu Pimpinan.

Kami persilakan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Ketua untuk catatan-catatannya untuk proses ke depan.

Saya persilakan dari Anggota bagi yang ingin mendalami. Silakan sebelah kanan, sebelah kiri. Kalau tidak ada di tutup ini. Kan lebih cepat lebih baik. Silakan, Pak Ichsan.

F-PDIP (ICHSAN SOELISTIO):

Terima kasih, Ibu Ketua.

Pimpinan Komisi III, Rekan-rekan Komisi III, KPK beserta jajarannya, Asrena beserta jajarannya,

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi memang kami juga dari kemarin melihatnya seperti itu karena untuk meminta. Kalau kita jumlah semua ini kebutuhan mitranya Komisi III, itu kebutuhan usulan tambahan anggarannya 57 triliun. Jadi kan langsung saja kita berpikir inikan tidak mungkin 57 triliun. Kalau tadi disampaikan 2.500 triliun ke 57 triliun itu sudah berapa persen, 5% sendiri hampir daripada seluruh APBN negara kita.

Untuk itu pada hari ini atau pada kesempatan ini untuk dua mitra ini saya melihat, ya kalau KPK meminta 171 miliar mau dikurang-kurangi kita juga bingung mana yang mau dikurang-kurangi. Tetapi yang saya konsern ini tentu Kepolisian Republik Indonesia ini. Memang pada tahun 2018 itu mendapatkan 95, pagu indikatifnya untuk 2019 turun menjadi kira-kira 77 triliun, dan usulan tambahannya menjadi 44,4 triliun. Saya kira juga dari angka ini apakah mungkin, sekali lagi tidak dengan maksud untuk masuk ke satuan tiga, Pak Asrena, apakah mungkin ini ada pengurangan? Karena untuk 44 triliun. Jadi artinya apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, kami akan merekomendasikan supaya di Banggar nanti itu tidak terlalu sulit untuk mencarinya, mungkin kira-kira 30 triliun apa berapa. Karena 44 triliun, antara 30 triliun dengan 44 triliun masih 14 triliun bedanya. Kebutuhannya Menkumham/Kementerian Hukum dan HAM satu tahun itu cuma kira-kira 11 triliun, ini penambahannya saja sudah sekian banyak. Karena tadi saya lihat almatusnya saja itu 26,8 triliun. Sekali lagi bukan mau masuk ke dalam satuan tiga. Tetapi kan kita mencoba dalam pembahasan penambahan ini mencari angka-angka yang memang prioritas untuk disampaikan ke Banggar.

Mungkin itu, Ibu Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Ichsan.

Sebelah kanan, Bang John. Silakan, Pak John.

F-PG (H. JOHN KENNEDY AZIZ, S.H.):

***Bismillaahirrahmaanirrahiim,
Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.***

**Pimpinan dan Anggota Komisi III yang saya hormati,
Pimpinan KPK beserta seluruh jajaran yang saya hormati,
Asrena Polri beserta jajaran yang saya hormati,**

Pertama saya menanggapi tentang KPK bahwa KPK mengajukan tambahan dana sebesar kurang lebih sekitar 171 miliar. Jelas tadi disebutkan bahwa kegunaan 171 miliar itu adalah untuk belanja pegawai dan sebagian besar adalah untuk rekrutmen pegawai. Kita juga tidak mau nanti seumpamanya KPK sudah merekrut pegawai kemudian menjadi berhutang atau tidak bisa membayar pegawainya kan juga sudah tidak mungkin.

Yang kedua mengenai anggaran kepolisian. Saya prihatin dari pagu tahun 2018 ke 2019 itu berkurang dari 90,6 triliun berubah menjadi 76 koma sekian triliun, kurang lebih kekurangannya itu sekitar 20 triliun, kurang lebih sekitar 20 triliun. Dan menurut hemat saya untuk institusi yang sebesar Polri itu tentu sangat-sangat berasa. Dan Polri merasa kekurangan dan mengajukan tambahan sebesar 44 triliun.

Saya dari Fraksi Partai Golkar tadi sudah disampaikan oleh Pak Pimpinan, tentu dalam konteks ini kita akan coba untuk memperjuangkan. Dan kebetulan saya juga di Anggota Badan Anggaran untuk memperjuangkan lebih lanjut. Tetapi benar apa yang disampaikan oleh Pak Ichsan dari PDI Perjuangan itu, bahwa dari 44,4 triliun ini kekurangan atau tambahan yang diajukan kira-kira *bottom*-nya berapa itu. Berapa itu artinya mau tidak mau yang harus dimohonkan supaya artinya jangan sampai mengganggu kinerja kepolisian itu kurang lebihnya adalah berapa, supaya menjadi acuan juga bagi kami dalam melakukan dan dorongan untuk supaya ini disetujui.

Saya pikir itu, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf.

***Wabillaahit Taufiq Wal Hidayah,
Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.***

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Pak John ini Anggota Banggar Fraksi Partai Golkar juga ini di Komisi III. Sebelah kiri masih ada? Pass? Sebelah kanan, silakan Pak Nasir Jamil.

F-PKS (H. MUHAMMAD NASIR JAMIL, S.Ag., M.Si.):

Terima kasih, Ketua. Ibu Ketua maksud saya.

**Bapak/Ibu Anggota Komisi III,
Asrena Polri dan juga Pimpinan KPK yang kami hormati,**

Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan dalam kapasitas pendapat pribadi sebagai Anggota Komisi III. Tentu saja sebagai Anggota Komisi III yang bermitra kerja dengan KPK, dengan Kepolisian Republik Indonesia, kami senantiasa menginginkan agar anggaran yang dialokasikan atau yang direncanakan oleh pimpinan atau katakanlah mitra kerja kami itu bisa dipenuhi, kan begitu. Apalagi tadi disampaikan bahwa dibandingkan anggaran 2018 kepolisian berkurang, lalu kemudian ada keinginan untuk menambah. Sebenarnya bukan keinginan maksud saya, itu kebutuhan. Karena itu tentu saja sebenarnya kalau kita mau lihat tugas dan fungsi kepolisian itu sangat luas sekali. Angka seperti itu sebenarnya belumlah cukup sebenarnya. Saya ingat ketika Pak Bambang Hendarso jadi Kapolri, Beliau itu memberikan satu tas besar yang isinya banyak sekali tentang visi, misi, *grand strategy* dan lain sebagainya, bagaimana kemudian Polisi yang ideal, ya bagaimana pembiayaan yang ideal bagi institusi kepolisian. Jauh memang ya dari harapan. Bahkan yang saya ingat itu diantara yang banyak yang saya ingat di situ disebutkan bahwa sebenarnya *take home pay* seorang Kombes itu ya dalam standard PBB itu lebih kurang 80 juta, ya *take home pay* seorang Kombes. Jadi dia bawa pulang ke rumah itu sekitar segitu, ya jadi dia tidak punya pikiran macam-macam lagi kira-kira. Jadi dengan anggaran seperti itu diharapkan ya Polisi benar-benar bisa melindungi, mengayomi dan menjadi teladan bagi masyarakat. Tapi Ibu Wakil Ketua yang saya hormati memang sekali lagi memang dengan luas wilayah Indonesia kemudian jumlah uang yang dianggarkan ini masih belum sesuai sebenarnya. Nah karena itu meskipun tadi Pak Ichsan bilang bahwa memang belum tentu ada uang itu tapi ya tentu saja kita berusaha ya untuk meyakinkan Badan Anggaran bahwa kemudian Kepolisian Republik Indonesia perlu mendapat dukungan anggaran seperti yang

mereka rencanakan. Kalaupun bergeser, bergeser sedikitlah, kan kira-kira begitu. Nah kami berharap kepada Anggota Banggar yang berasal dari Komisi III bisa untuk kemudian meyakinkan Badan Anggaran terkait dengan rencana anggaran yang diajukan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Dan harapan itu juga kami nanti akan kami sampaikan dalam rapat pengawasan Pak Gatot, ya karena ini anggaran tentu kita boleh sih menyinggung soal pengawasan tapi sedikit ya tapi paling tidak inilah harapan kami terkait dengan Kepolisian Republik Indonesia. Itu satu Ibu Wakil Ketua yang kami hormati.

Yang kedua tentu KPK, ya KPK tadi Pak Alex menyampaikan bahwa kebutuhan anggaran itu untuk menangani perkara-perkara. Ada keinginan masyarakat ya bagaimana perkara-perkara yang mereka laporkan tidak kemudian bisa ditindaklanjuti. Dan juga ada ketika melakukan koordinasi dan supervisi ketika melimpahkan kepada Kepolisian dan Kejaksaan mereka juga *hand off* ya karena tak punya dana kira-kira begitu, sehingga KPK perlu dana. Ya tentu saja, tentu saja memang kita ingin KPK juga mendapatkan anggaran yang memadai, itu angkanya tadi sekitar lebih kurang sembilan ratusan, ya Pak ya sembilan ratusan milyar lebih ya ngga sampai satu triliunlah. Karena itu memang Ibu Wakil Ketua yang kami hormati apa yang diharapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ya tentu ini harus menjadi perhatian kita, meskipun memang saya pribadi menilai bahwa angka untuk pencegahan ini memang masih belum ideal sebenarnya. Jadi meskipun memang dibandingkan dengan penindakan hanya beda sekitar angka delapan ya satu digit bedanya Deputi Penindakan dan Deputi Pencegahan. Karena itu saya tidak tahu persis tapi paling tidak harapan kita agar kemudian KPK juga memberikan porsi yang besar ya jadi kalau disini lima puluh sembilan sekian milyar lalu kemudian Deputi Pencegahan enam puluh tujuh sekian milyar kan itu jauhnya tidak beda sekali Bu. Nah harapan kami melalui Wakil Ketua mudah-mudahan KPK sekarang ini memberikan porsi yang lebih besar untuk pencegahan, ya karena apa, karena kalau kita melihat apa misinya, misinya KPK itu kan meningkatkan efisiensi dan efektifitas penegakan hukum dan menurunkan tingkat korupsi di Indonesia melalui koordinasi, supervisi, monitor, pencegahan dan penindakan. Jadi artinya kata pencegahan mendahului kata penindakan ya tentu idealnya kita berharap pencegahan itu mendapatkan porsi Pak Alex dan Ibu Basaria. Karena itu memang kalaulah pencegahan ini bisa kita maksimalkan barangkali kita bisa mengurangi OTT-OTT di daerah-daerah. Terus terang saja memang bukan kaget ya tapi ketika kemudian Gubernur Aceh itu ditangkap karena ada kaitannya dengan suap-menyuap ya kita teringat dengan pernyataan Pimpinan KPK bahwa ada sejumlah daerah di Indonesia yang mendapat pengawasan, ya mendapat bantuan dalam pengertian bagaimana mereka mengelola anggaran mereka. Makanya kami juga menilai pengawasan yang dilakukan terhadap sejumlah daerah itu salah satunya adalah Aceh, kan begitu. Tapi kemudian kebobolan juga, ya saya ngga tahu siapa yang lengah ya siapa yang awas, kira-kira begitu ya. Apakah kita yang lengah sehingga kemudian terjadi suap-menyuap atau memang mereka yang seperti itu. Ya jadi Pimpinan KPK yang saya hormati barangkali ini yang harus menjadi perhatian, ya karena apapun ceritanya ketika kita lihat itu ya maka kita kemudian mengingat kembali apa yang disampaikan oleh Pimpinan KPK sebelumnya. Soal bagaimana KPK mengawasi, membantu dan lain sebagainya tapi ternyata kebobolan juga kira-kira begitu, nah ini ada apa ya ada apa. Nah itu barangkali beberapa hal dan yang paling terakhir tentu saja kita berharap agar Pimpinan KPK bisa menindaklanjuti perkara-perkara karena ada juga keluhan masyarakat kepada kita yang bahwa mereka sudah menyampaikan laporan kepada KPK tapi kemudian KPK meminta ini

meminta itu kepada orang yang melaporkan, mereka bilang kami bukan negara, kami ini warga masyarakat yang memang diatur oleh undang-undang untuk berpartisipasi melaporkan kepada masyarakat tapi oleh orang di dalam sana diminta untuk melengkapi ini melengkapi itu dan lain sebagainya, padahal dia bukan negara dia warga negara. Seharusnya negaralah yang melakukan itu, dan itu ada pada KPK, kira-kira begitu. Sehingga kemudian laporan tahun 2007, 2008, 2006 itu *walakalam walasalam* kira-kira begitulah. Nah ini harapan kita kepada Pimpinan KPK, karena gini KPK punya kuasa untuk melakukan penindakan ya punya pencegahan kami juga punya kuasa untuk menetapkan anggaran, seperti yang dikatakan Pak Abdul Kahar tadi itu. Oleh karena itu mari kita mensinergikan kuasa-kuasa yang kita miliki. Jangan hanya mengedepankan kami punya kuasa, gitu loh ya lalu kita lupa bahwa orang lain juga punya kuasa kira-kira begitu. Nah barangkali yang paling arif dan bijaksana itu adalah kalau kita bisa mensinergikan kuasa-kuasa yang kita miliki. Nah ini harapan kita kepada KPK ya terkait dengan alokasi anggaran yang kita baca pada sore hari ini.

Barangkali demikian Ibu Wakil Ketua yang saya hormati, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kayanya Pak Muslim Ayub juga mau menyampaikan kayaknya.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Terima kasih Pak Nasir Jamil, kita ke kiri dulu. Kiri kayaknya tidak ada berarti langsung ke Pak Muslim Ayub. Ini lagi musibah ini Aceh ini.

F-PAN (H. MUSLIM AYUB, S.H., M.M.):

Ya itu yang mau saya sampaikan. *Alhamdulillah* mungkin barangkali luar biasa kami sangat berduka ini ya gubernur kami yang betul-betul kami pilih kemarin terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Sebenarnya Bapak Ibu KPK yang saya hormati, Bapak Asrena. Ini mohon dulu Pak KPK tolong mendengarkan saya ngomong dulu sedikit. Yang pertama walaupun Pak Irwandi sudah dalam tahanan KPK tapi harus saya berikan apresiasi Bu, bagaimana persoalan-persoalan anggaran 2018 dipergubkan, itu dipergubkan Indonesia hanya Aceh yang dipergubkan tanpa pembahasan melalui DPR, karena disini banyak kecurangan-kecurangan dengan dana aspirasi yang dilakukan oleh DPR Aceh sendiri. Justru karena itu dengan keberanian Irwandi mempergubkan anggaran Aceh yang mencapai 14 triliun itu suatu hal yang terpuji, dan ini sudah dipuji oleh masyarakat. Tapi dengan kejadian ini mengiris hati kami, ini kami dari Aceh ini sangat berduka Pak hari ini. Mungkin kita nda tahu dimana persoalan-persoalannya. Kalau persoalan anggaran kita katakan Bu, Bapak Polisi yang saya hormati jujur saya katakan di Indonesia ini siapa sih kepala negara, kepala daerah mohon maaf kepala daerah baik Bupati dan Gubernur yang tidak dapat fee. Saya rasa itu tidak perlu dirahasiakan lagi. Kebetulan ini sudah ada asnya, saya rasa kalau untuk fee-fee untuk Bupati itu nda perlu kita rahasiakan lagi mungkin karena permainan cantik

mereka tidak tersentuh dengan ini. Saya lima periode Bu jadi Anggota DPR, tapi saya tahu betul bagaimana sistem anggaran di Indonesia ini. Ini yang barangkali yang perlu kita titipkan, ini barangkali perlu kita tertibkan supaya jangan ada lagi persoalan-persoalan fee di Indonesia ini. Terutama saya sependapat apa yang diusulkan oleh KPK dalam hal pencegahan. Saya rasa apa yang disampaikan oleh KPK Ibu Komisioner ini sangat layak kita pertimbangkan untuk kita apresiasi dengan penambahan anggaran ini. Karena untuk penindakan dan pencegahan ini perlu dana yang sangat maksimal untuk membantu kinerja mereka. Apalagi banyaknya penumpukan perkara yang barangkali sudah berulang-tahun di KPK itu Bu, yang tidak ditindaklanjuti. Ini dampak dari soal dana juga, bagaimana mereka untuk melakukan koordinasi, bagaimana mereka untuk melakukan supervisi. Ini mohon Pak Ketua Pimpinan untuk memikirkan penambahan ini, dan saya dari Fraksi PAN sangat setuju ini direalisasikan dengan penambahan ini.

Untuk Kepolisian Bapak Asrena, ada hal yang perlu kami sampaikan ada dua point menyangkut dengan pembangunan gedung kantor Subussalam dan Pidie Jaya yang sudah hampir sepuluh tahun merdeka, saya katakan sudah sepuluh tahun, merdeka dalam arti terbentuknya kabupaten itu. Tapi sampai saat ini pembangunan gedung itu belum sesuai yang kita harapkan. Kami sependapat, apalagi ini kami terpanggil kami harus terpanggil mengatakan itu karena kami Dapil Aceh dari Pak Nasir dan saya. Untuk Subussalam sendiri ini masih dalam tahap pembangunan, dan kami mohon untuk anggaran tahun 2019 ini bisa terselesaikan antara Pidie Jaya dan Kota Subussalam. Apalagi Kejaksaan Negerinya sudah dianggarkan oleh Jaksa Agung kemarin sampai 35 milyar. Sementara di Kepolisian ini belum kita tahu seberapa anggaran untuk tahun 2019. Ini mohon barangkali ditindaklanjuti dalam hal usulan kami yang kami sampaikan. Yang ke dua pengadaan. Ini memang sangat penting Pak Asrena, pengadaan pesawat terbang untuk Kapolri. Kemarin saya dengan Pak Nasir Jamil mendampingi Pak Kapolri untuk berangkat ke suatu daerah pelosok disana di Aceh Tenggara. Pesawat itu memang tidak layak sebenarnya yang kami naiki. Saya pun sudah memberikan amanah kepada istri saya, ini ini ini saking takutnya pesawat itu untuk dinaiki, tidak layak sekali. Apalagi dalam rangka, amanah ya hutang kita ada disini ini harus dibayarkan kalau saya ada apa-apa di udara begitulah kira-kira. Jadi yang saya maksudkan dari kesimpulan ini, apalagi menjelang Pemilu legislatif 2019 ini kan banyak ritme yang perjalanan yang harus dilaksanakan oleh Kapolri sendiri. Ini kalau dengan bentuk pesawat begitu saya rasa tidak sangat memungkinkan. Jenis pesawatnya itu, baling-baling itu Pak Kapolri. Kita tidak mau mendengar Kapolri itu naik pesawat ada bantuan dari pihak-pihak lain. Nanti ada pengusaha memberikan pesawatnya, dan lain sebagainya menumpang ke pesawatnya. Untuk menghindari itu kita anggarkan saja dengan pesawat baru. Kami pun barangkali pergi dengan Pak Kapolri mendampingi nanti ke Dapil tidak was-was lagi untuk memberikan pesan kepada keluarga kita. Dan luar biasa Pak di udara pun kami suara mesinnya itu bukan suara mesin pesawat lagi suara mesin traktor. Jadi nda pantas sekali itu pesawat begitu, ini pejabat negara disitu semua. Kapolri, Wakapolri, malah mungkin Presiden bisa menumpang pesawat itu walaupun ada pesawat kepresidenannya. Ini satu catatan, kami dari Fraksi PAN dan ini disampaikan tadi Ketua Fraksi, tolong sampaikan Pak Muslim untuk usulan ini. Saya mohon ini dicatat. Yang ke dua, dengan rumah dinas. Rumah dinas Pak, kami jalan ke Dapil sangat prihatin sekali kami melihatnya, tanpa ada dana rehab sekali pun sejak didirikan rumah tersebut. Ini jangan kita lihat di seputaran perkotaan saja tapi kita lihat di ujung nusantara, seperti Papua, Aceh. Ini sangat layak untuk diperhatikan dengan keadaan rumah dinas ini.

Saya rasa ini saja yang dapat saya sampaikan, saya sudah dengan

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Terima kasih, Pak Muslim Ayub.
Pesan-pesannya tadi itu menarik.

Pak Asrena dan Pimpinan KPK yang saya hormati,

Kita tadi sudah sepakat untuk selesai Pukul 16.00. Setelah itu fraksi-fraksi di Komisi III akan memutuskan Pleno terkait dengan pagu indikatif. Saya memberi kesempatan kepada dua institusi ini untuk menyampaikan respon terhadap catatan-catatannya tadi supaya bisa menjadi pembahasan nanti di Banggar.

Secara teknis kami ingin menyampaikan kepada kedua mitra kami bahwa dalam rangka penyusunan anggaran untuk tahun 2019 juga anggaran yang sedang berjalan di tahun 2018 kalau ada kegiatan-kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh institusi Bapak/Ibu sekalian berkaitan di Dapil masing-masing, contoh saya sebut saja ini Pak Alex misalnya ada kegiatan sosialisasi soal Undang-Undang tentang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Dapil saya misalnya di Kalimantan Barat, tolong dilibatkan Anggota DPR RI dari Dapil itu. Ada dua dari Dapil kami yang ada di situ. Kemudian misalnya dari Aceh ada dua juga, Sum-Bar juga. Jadi tolong ini, tinggal berkoordinasi LO-nya dengan staf sekretariat kita supaya kita saling membantu, sehingga dengan demikian peran maksimal Anggota Komisi III untuk membantu mitranya ini bisa semakin kita lihat geraknya di tahun 2018 dan tentu saja di 2019 nanti. Tinggal dikoordinasikan saja antar LO.

Baik, dari meja Pimpinan itu saja. Saya serahkan responnya. Saya mulai dari KPK dulu ya, Pak. Silakan, respon singkat saja.

WAKIL KETUA KPK (ALEXANDER WARWATA):

Terima kasih, Ibu Pimpinan. Terima kasih juga ada tanggapan dari Bapak/Ibu Anggota Komisi III.

Rasanya dari berbagai masukan tadi terkait dengan... Sinyalnya *sih* setuju ya terhadap keinginan untuk menaikkan ya, Ibu. Tapi kembali lagi, memang kami di KPK itu mensinergikan upaya-upaya penindakan dengan pencegahan, seperti misalnya di Aceh, kemarin kita OTT gubernurnya. Nanti berdasarkan apa *sih* kira-kira kelemahan-kelemahan, titik-titik rawan kenapa sampai bisa terjadi pengaturan dalam alokasi dana otonomi khusus itu, nanti dari pencegahan yang akan turun. Kebetulan Pak Pahala ini sekarang menjabat Plt. Kesekjenan, beliau adalah Deputy Pencegahan. Nanti beliau yang akan turun langsung. Ada sinergi antara penindakan dan pencegahan, terutama kami minta agar daerah-daerah yang kebetulan kepala daerahnya itu bermasalah hukum, kena OTT, itu menjadi prioritas kami untuk memetakan titik-titik rawan terjadinya tindak pidana tersebut.

Tambahan terhadap biaya penindakan, dari hasil rekrutmen yang 480 orang tadi memang kami sudah mengalokasikan 80% dari rekrutmen pegawai yang baru tahun 2017 itu akan kami prioritaskan untuk mempercepat upaya-upaya penindakan.

Sekitar 400-an dari pegawai baru tersebut akan kita alokasikan untuk ke deputian penindakan, sehingga laporan-laporan masyarakat itu dapat segera kita tindaklanjuti dan juga penumpukan perkara-perkara yang sampai sekarang juga masih terjadi, itu juga dapat segera kami selesaikan.

Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ibu Basaria, Pak Sekjen, ada yang ingin menambahkan? Mungkin itu, Ibu Pimpinan. Kami kembalikan kepada Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Alex.

Selanjutnya ke Pak Gatot. Silakan, Pak.

ASRENA POLRI (IRJEN POL.GATOT EDI PRAMONO):

Terima kasih, Ibu Pimpinan.

Yang pertama kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak-bapak yang sudah memberikan masukan, dari Pak Ichsan, Pak John Kennedy, Pak Nasir, kemudian Pak Muslim juga, terkait dengan pengajuan anggarannya memang dibutuhkan oleh Polri pada tahun 2019 ini.

Tadi ditanyakan tentang minimal. Sebenarnya kami ingin menjelaskan bahwa ketika kita mengajukan kepada Kementerian Keuangan itu sebanyak 129 triliun. Kenapa demikian? Karena pada tahun 2019 kita itu menghadapi Pemilu presiden, kemudian juga Pileg, sehingga anggaran itu akan semakin meningkat. Ketika kita menghadapi Pilkada saja kalau saya membandingkan 2017 dengan 2019, 2017 itu anggaran Polri sudah 99 triliun, kemudian turun 96 triliun pada 2018 ada Pilkada. Ini ada Pilpres, ada Pileg. Ditambah lagi tunjangan kinerja naik 70%. Ditambah lagi kondisi kita sekarang kita akan meningkatkan peran Satgas terorisme ini kan menambah satu anggaran-anggaran yang sudah kita perhitungkan. Belum lagi kemudian kita juga menambah seperti dikatakan tadi oleh Pak Muslim pengadaan-pengadaan dan juga kita membatasi ini tidak semuanya, pengadaan-pengadaan makro seperti untuk Polres, kemudian untuk Polda Kaltara, sehingga setelah kami hitung dari 129 itu kita keluarlah angka 44,4 triliun. Jadi mungkin kalau pada kesempatan yang baik ini kepada yang terhormat Bapak Ketua dan Ibu Pimpinan, kami berharap 44,4 triliun ini bisa dipenuhi. Itu harapan kami. Tentunya nanti kami kembalikan kepada Bapak dan Ibu sekalian.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Gatot.

Sengaja tadi kita meminta masukan hal-hal yang sangat penting dan tidak bisa ditawar dalam pengajuan anggarannya misalnya begini, mandat dari Undang-Undang tentang Penanggulangan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme itu kan pembentukan dan penguatan Densus-densus ini. Itu kan satu hal pelaksanaan undang-undang yang kita tidak bisa buang anggarannya. Pasti ada *item-item* lain juga yang mungkin bisa ditunda, bisa dijadikan catatan dulu *lah* disamping dengan kegiatan-kegiatan lain. Itu yang kami maksudkan di Komisi III ini *item-item* yang khusus yang memang sangat diperlukan. Kalau tidak dikasih, maksud saya di

pengajuan tambahan anggaran, itu akan berdampak kepada pelaksanaan kegiatan institusi Bapak. Tapi teknisnya nanti tentu saja antara Komisi III lebih detail lagi setelah... Ini kan baru pagu indikatif, Pak. Nanti pagu sementara, nanti ada pagu definitif. Masih panjang ini kata Ketua Banggar senior ini. Boleh dibilang begitu ya, Pak Ketua Banggar senior?

Baik. Terima kasih atas paparannya, Pak Asrena beserta Jajarannya, Pak Alex, Ibu Basaria, Pak Pahala beserta teman-teman dari KPK. Terima kasih sudah hadir di sini.

Kalau tidak ada yang ingin ditambahkan lagi oleh Anggota dan mitra, dengan demikian kita akan menutup rapat kita pada sore hari ini. Belum Jam 16.00 *sih*, tapi sudah selesai. Bagus *lah*, lebih cepat lebih baik. Selanjutnya dengan resmi kami nyatakan rapat pada hari ini ditutup.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 15.45 WIB)